STRATEGI DAN TANTANGAN : RENCANA PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL PEMERINTAH LAOS TAHUN 2000-2020

Nala Nourma Nastiti; Firdaus Muhammd Iqbal
Universitas Jenderal Achmad Yani

ABSTRACT

The national economic development has become one of the vital things to show existence in global economy competition. At the regional level, ASEAN has sought to make an idea of achieving regional economic progress through the MEA. Efforts by ASEAN countries to strengthen ASEAN regionalism in the world. This test continues to provoke each country to compete to improve its national economy to achieve a good economy requires a good democratic system, so that the state is able to realize the rights of all citizens. Besides Indonesia, one of the countries that is also trying to realize the democratization and economic improvement is The Lao People's Democratic Republic (PDR). National Social and Economic Development in Laos is one of the manifestations of the Laotian people's democratization process that upholds harmony and solidarity within the national community. The Lao government has prepared several development strategies in the field of Social and Economy through the National Growth and Progressive Eradication Strategy (NGPES) 2000-2020. As a country that has long been a "backward country", the process of democratization of economic development is a big challenge for the laos government in the midst of existing social dynamics.

Keywords : *The Lao People's Democratic Republic, Economy, NGPES*

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi nasional suatu negara menjadi salah satu hal vital untuk menunjukkan eksistensi dalam persaingan global. Dalam tingkat regional, ASEAN telah berupaya membuat suatu gagasan pencapaian kemajuan ekonomi kawasan melalui MEA. Upaya-upaya yang dilakukan negara-negara ASEAN untuk dapat memperkuat regionalisme ASEAN dimata dunia. Hal tersebut berlanjut dan terus memancing masing-masing negara untuk berlomba-lomba meningkatkan ekonominya nasionalnya. Untuk mencapai ekonomi yang baik diperlukan sistem demokrasi yang baik sehingga negara mampu mewujudkan hak seluruh warga negaranya. Selain Indonesia, salah satu negara yang juga sedang berupaya mewujudkan demokratisasi dan peningkatan ekonominya ialah Laos. Pembangunan Sosial dan Ekonomi Nasional di Laos adalah salah satu dari perwujudan proses demokratisasi rakyat Laos yang menjunjung tinggi keharmonisan dan solidaritas dalam komunitas nasional. Pemerintahan Laos telah mempersiapkan beberapa strategi pembangunan di bidang Sosial dan Ekonomi ialah melalui Strategi Pertumbuhan Nasional dan Pemberantasan Kemiskinan (*National Growth and Proverty Eradication Strategy* (NGPES)) 2000-2020. Sebagai negara yang sejak lama berstatus “negara terbelakang”, proses demokratisasi pembangunan ekonomi tantangan besar bagi pemerintah Laos di tengah kondisi dinamika sosial yang ada.

Kata Kunci : Republik Demokratik Rakyat Laos, Ekonomi, NGPES

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pada dasarnya berhubungan dengan setiap upaya untuk mengatasi masalah keterbatasan sumber daya (Abdullah, 2003). Pembangunan mengharuskan pemerintah memilih berbagai cara untuk mengoptimalkan keadaan ekonomi di dalam keadaan sumber daya yang terbatas. Untuk hal tersebut maka pemerintah perlu menjalankan fungsinya dalam pembangunan sebagai motivator sampai sebagai regulator. Setiap keputusan pemerintah adalah untuk memaksimalkan keadaan ekonomi (UAJY 2014).

Dalam lingkup regional Asia Tenggara melalui ASEAN, negara-negara anggota ASEAN telah sepakat untuk bersama-sama menghadapi persaingan ekonomi global melalui persiapan menghadapi MEA, dalam keberlanjutannya masing-masing negara kemudian berupaya untuk terus melakukan pembangunan dari segala sektor untuk meningkatkan ekonomi nasionalnya. Diantara negara-negara ASEAN tentu saja terlihat negara mana yang paling tinggi tingkat ekonominya, dan negara mana yang paling rendah tingkat ekonominya.

Laos merupakan salah satu negara di ASEAN yang perekonominya tidak stabil. Berbagai upaya pemerintah menaikkan perekonomian negara telah dilakukan terutama sejak di sepakatinya komitmen MEA 2015. Hal tersebut semakin jelas terlihat sejak pertemuan KTT ASEAN tahun 2005, Perdana Menteri Laos menyampaikan bahwa tujuan Laos adalah memberantas kemiskinan sehingga dapat menyingkirkan status “negara terbelakang” pada tahun 2020 dengan berfokus pada pembangunan ekonomi.

Perdana Menteri Laos Bouasone Bouphavanh berkeyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi Laos akan rata-rata 7,5 hingga 8%, yang akan diterjemahkan ke dalam pendapatan per kapita sekitar \$ 800 pada tahun 2020 (PDR 2015). Dengan demikian pemerintah Laos menyusun rencana strategi pemberantasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi secara cermat untuk mengubah status Laos menjadi negara yang lebih maju.

Sepanjang tahun fiskal 2011-2012, Laos telah mengatasi berbagai kesulitan, termasuk bencana banjir, inflasi, dan krisis moneter global, sehingga ekonomi nasional telah memelihara laju pertumbuhan pesat. Indikator utama ekonomi Laos telah mencapai prediksi, atau bahkan lebih baik. Produk domestik bruto (PDB) Laos mencapai US\$ 7,74 miliar, atau meningkat 8,3 persen. PDB per kapita Laos adalah US\$ 1.203 (CRI 2012). Upaya peningkatan perekonomian Laos tidak terlepas dari upaya demokratisasi Laos yang terus diupayakan untuk membuka diri secara ekonomi dalam pasar bebas.

Negara ini memulai perubahan ke arah yang lebih baik yaitu dengan menjadi republik demokrasi. Demokratisasi merupakan proses dilakukannya diversifikasi kekuasaan untuk meniadakan kesenjangan hak-hak politik warga negara serta memperluas hak warga negara untuk bersuara dan berpendapat (Haris 2007). Dalam upaya demokratisasi di Laos sebagaimana yang disebutkan pada *Bali Democracy Forum* yang ke sembilan pada tahun 2016 oleh H.E. Mr. Phongsavath Boupha (PDR 2015).

Pemerintah Laos terus melakukan berbagai strategi kebijakan dalam segala aspek kehidupan. Pemerintah Laos berpandangan bahwa demokrasi adalah nilai universal berdasarkan kebebasan menyatakan keinginan rakyat untuk menentukan sendiri sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya dan partisipasi penuh mereka dalam segala aspek kehidupan mereka. Hal tersebut juga tercantum dalam konstitusi Laos pasal 2 yang menyebutkan "Rakyat Laos adalah Negara Republik Demokratik, dimana semua kekuatan rakyat, oleh rakyat dan untuk kepentingan masyarakat multi-etnis dari seluruh strata". Hal tersebut menjadi dasar bagi negara untuk menyadari keanekaragaman rakyat Laos yang harus dipertahankan dan dipenuhi hak-haknya. Oleh sebab itu, Kondisi Laos sebagai negara terbelakang terkait dengan keterbatasan Laos untuk mengatasi hambatan dari letak geografis Laos yang tidak memiliki batas perairan dan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Hal tersebut telah dibahas dalam kajian penelitian sebelumnya sehingga menjadi dasar bagi peneliti untuk melanjutkan penelitian tersebut dengan sudut pandang yang lain dan sesuai dengan perkembangan yang ada.

II. PEMBAHASAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis. Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono (2009: 29) adalah : "Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum". Sehingga penelitian deskriptif analitis mengambil masalah yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah pada saat penelitian sedang dilaksanakan serta hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Kajian literatur dari penelitian ini yaitu dari jurnal penelitian Eric Wicaksono tentang Koridor Ekonomi sebagai Jembatan Keterkuncian Geografis : Kasus Pertumbuhan Ekonomi Laos 2000-2010. Permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai negara

landlocked, Laos dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan dengan negara yang mengalami hambatan serupa. Keterkuncian acap kali dipandang sebagai hambatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya menyebabkan absennya akses menuju lautan, keterkuncian juga meningkatkan biaya untuk melakukan perdagangan (Wicaksono 2017).

Koridor ekonomi sebagai fungsi pertumbuhan berhasil menularkan efek *spillover* dari dinamika positif kawasan di sekitar Laos. Dengan kawasan dinamis yang melingkunginya, Laos dapat mengurangi peran penting dari keterkunciannya. Kemitraan yang dijalin dengan negara-negara yang berada di sekitarnya secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Laos. Didukung dengan pengelolaan hubungan dan kebijakan ekonomi yang baik, negara-negara yang melingkungi Laos tidak segan untuk menyepakati perjanjian bilateral yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan positif. Peningkatan statistik perdagangan, pengembangan jalur konektivitas, pengurangan tarif impor, dibentuknya *Special Economic Zone*, hadirnya preferensi tarif dagang, menjadi bukti empiris yang memperkuat upaya Laos dalam mengurangi dampak keterkuncian geografisnya (Wicaksono 2017).

Permasalahan ekonomi menjadi persamaan dalam kajian peneliti sebab faktor ekonomi lah yang menjadi strategi utama bagi Laos untuk kedepannya, sedangkan perbedaannya adalah dilihat dari kurun waktu permasalahan dari penelitian sebelumnya yang hanya membahas koridor ekonomi Laos sampai tahun 2010. Penelitian ini melanjutkan strategi dan tantangan ekonomi Laos sampai tahun 2020.

1. Strategi Pembangunan Ekonomi Pemerintah Laos

Berdasarkan data, ekonomi nasional Laos telah mencapai kemajuan besar melalui perjuangan sulit dalam 25 tahun terakhir. Setelah melalui krisis moneter Asia pada 1997, ekonomi Laos mengalami pertumbuhan pesat dari 2001 hingga 2006, sekitar 6,8 persen per tahun. Pada periode 2006-2010, ekonomi Laos bahkan meningkat sampai 7,9 persen. Produk nasional bruto per kapita Laos terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga mencapai US\$ 1.030 pada 2009 (CRI 2012). Namun pertumbuhan ekonomi tetap mengalami dinamika yang fluktuatif seperti yang di jelaskan dalam tabel berikut (Kompas 2011):

Tabel 1. Tabel Perkembangan Periode Kebijakan Ekonomi Laos

PERIODE	KARAKTER	KEBIJAKAN MAKROEKONOMI LAOS
1975 – 1986	Pra reformasi	Negara sosialis, kepemilikan negara dan kontrol aset negara, <i>collectivization of agriculture</i> , stagnasi ekonomi, penurunan produksi beras (1979), inflasi
1986 – 1989	Masa Awal Mula Reformasi	Liberalisasi harga dan perdagangan, akhir dari sistem monopoli, permulaan dari <i>New Economic Mechanism (NEM)</i>
1990 – 1994	Keberhasilan Manajemen Ekonomi dan Stabilisasi	Structural Adjustments Measure (Pinjaman Luar Negeri) yang didukung oleh World Bank, IMF, UN, dan ADB (Asian Development Bank)
1995 – 1997	Pemulihan Masalah Finansial	Muncul masalah politik akibat reformasi, desentralisasi dimulai, fiskal dan administrasi melemah, bergabung dengan ASEAN
1997 – 1998	Krisis Finansial di Asia	Kerjasama Luar Negeri menurun, Aset negara hilang, masalah anggaran dan defisit keuangan, inflasi.
1998 – 2000	Destabilisasi Finansial	Pemulihan keuangan, inflasi, depresiasi.
2000 – 2004	Pemulihan dan Stabilisasi Ulang	Penerapan Agenda Pemulihan 5 Tahun, Pendisiplinan Fiskal, Transformasi Struktural dan Revitalisasi dalam proses reformasi, meningkatkan integrasi regional, Penerapan <i>Strategy (NGPES)</i>

PBB menyebutkan bahwa perencanaan dan pengembangan Laos telah didorong dari pemerintah pusat sejak rezim sosialis mulai berkuasa pada tahun 1975 sehingga segala keputusan beroperasi di pemerintah pusat. Pada *Bali Democracy Forum* pemerintah Laos menetapkan sistem rencana 5 tahun (PDR 2015) pemerintah nasional sebagai sistem rencana yang berdasarkan konsensus dari pemerintahan provinsi dan kabupaten yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah pusat. Rencana kebijakan tersebut diawasi oleh Komite Perencanaan dan Investasi (CPI). Rencana tersebut dilakukan secara bertahap dalam jangka panjang hingga tahun 2020.

Proses desentralisasi pemerintahan dimulai pada tanggal 11 Maret tahun 2000 dalam instruksi perdana Menteri 01/PM, bahwa pemerintah provinsi akan menjadi unit pengembangan strategis, pemerintahan kabupaten akan menjadi unit anggaran dan perencanaan, serta unit desa akan menjadi pelaksana unit (PDR 2015). Hal tersebut juga disahkan dalam undang-undang Pemerintah Daerah tahun 2003 (*Office Presidentes 2003*) yang menetapkan kerangka hak dan kewajiban dari provinsi, kabupaten, kota dan perangkat desa (ResearchGate 2005).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa konsep strategi pembangunan yang diterapkan oleh Laos tergolong dalam kriteria strategi pembangunan ekonomi yang disebut strategi pertumbuhan. Dalam macam-macam konsep strategi pembangunan nasional, strategi pertumbuhan akan menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai kriteria utama bagi

pengukuran keberhasilan pembangunan melalui proses *trickle down effect* (tindakan koreksi pemerintah dalam mendistribusikan hasil pembangunan) (Amadeo 2018). Dengan adanya koreksi terhadap pembagian hak dan kewajiban lokal dan pusat tersebut diharapkan dapat mempermudah koordinasi pembangunan ekonomi di seluruh Laos secara merata.

Langkah pertama yang diambil Laos adalah menarik modal asing. Laos berkali-kali merevisi undang-undang investasi asing, serta mengizinkan perusahaan asing mentransfer keuntungan keluar Laos (CRI 2012). Investor asing juga diizinkan mendirikan perusahaan dengan modal murni atau patungan. Pemerintah Laos bahkan tidak memungut pajak terhadap perusahaan asing untuk lima tahun pertama bisnis di Laos. Nilai kontrak melalui modal asing sepanjang 2010 adalah US\$ 1,641 miliar, 64 persen lebih tinggi daripada target semula. Laos juga memandang penting pembangunan zona ekonomi khusus. Menurut Duta Besar Indonesia untuk Laos Kria Fahmi Pasaribu, selama tahun 2011-2012 pertumbuhan ekonomi Laos mencapai 8 persen. Itu merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang sejarah Laos. Salah satu pemicunya adalah masuknya sejumlah perusahaan swasta untuk berinvestasi. Sayangnya, pertumbuhan itu masih terkonsentrasi di wilayah selatan atau di sekitar Vientiane (Kompas 2011).

Sejak bergabung menjadi anggota ASEAN, pemerintah Laos mulai terbuka untuk mengadakan diskusi dan kerjasama pembangunan ekonomi dengan banyak negara (ASEAN 2014). Dengan keikutsertaan Laos di ASEAN dan komitmen liberalisasi perdagangan, pemerintah Laos terus berupaya melakukan integrasi ekonomi yang lebih kuat ke pasar. Dalam perekonomian ASEAN yang semakin terintegrasi, Laos sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi regional, pariwisata, investasi asing dan bantuan luar negeri. Beberapa diantaranya adalah kerjasama yang disebut pembangunan segitiga Laos, Kamboja dan Vietnam; kerjasama antara Laos, Thailand dan Kamboja; serta kerjasama ekonomi perdagangan dan pembangunan perbatasan antara Ayeyawaddy dan Chao Phraya (Rivers 2013).

Laos berani mengakui ketertinggalan ketika memulai reformasi dan restrukturisasi. Laos berusaha mengejar dengan bercermin pada pengalaman keberhasilan negara-negara lain, sekaligus memadukan dengan keadaan dalam negeri untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan ekonomi (CRI 2012). Berbagai potensi yang dimiliki Laos menjadi landasan pemerintah untuk mengoptimalkan potensi tersebut untuk peningkatan ekonomi negara. Laos memiliki beberapa komoditi ekspor utama diantaranya : hasil pertanian, emas, tembaga dan hasil tambang lainnya, tenaga listrik, produk kayu, dan pakaian jadi. Komoditi – komoditi tersebut dikirim ke beberapa negara yaitu Thailand,

Tiongkok dan Vietnam. Sedangkan beberapa komoditi yang dimiliki Laos diantaranya : bahan-bahan konstruksi, mesin-mesin, kendaraan dan suku cadang, perlengkapan produksi, bahan bakar minyak, aneka produk makanan dan barang konsumsi. Seluruhnya tersebar dari negara Thailand, Tiongkok, Vietnam dan Jepang (CRI 2012).

Data menurut PBB donor internasional lain diantaranya *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, *Agence Française de Développement (AFD)*, dan *Badan Pembangunan Internasional Australia (AusAID)* (United Nations 2013). Pertumbuhan PDB riil diperkirakan mencapai 6 % pada tahun 2004. Pertumbuhan 11,4% pada sektor industri yang didorong oleh ekspansi di bidang pertambangan. Sektor jasa meningkat sebesar 7,3% sebagian besar pada sektor pariwisata.

Pada tahun 2003 kemiskinan menurun menjadi 30% setelah sebelumnya sebesar 45%. Penurunan jumlah kemiskinan tersebut dilemma tersendiri bagi pemerintahan Laos yang menggantungkan proses pembangunan kepada negara atau pihak-pihak donor tersebut. Keberadaan lembaga atau negara donor menjadi bayang-bayang bagi pemerintahan Laos yang tidak dapat dengan mudah dihilangkan. Hal tersebut sesuai dengan konsep strategi ketergantungan yang muncul pada tahun 1965, dikarenakan adanya ketidaksempurnaan strategi pertumbuhan dan strategi pembangunan dengan pemerataan.

Peningkatan pembangunan ekonomi melalui pembentukan strategi pembangunan yang dibentuk pada tahun 2005, pemerintah Laos mendapatkan bantuan donor internasional. Bantuan-bantuan donor internasional dapat memberikan efek peningkatan stabilitas ekonomi negara terlihat dari inflasi 7,9% menjadi 4,1% pada tahun 2009, tingkat defisit menurun menjadi 7% dari produk domestik bruto (Rivers 2013). Hal tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah Laos untuk lebih meningkatkan kerjasama baik dengan pihak domestik maupun internasional. Selain itu pemerintah Laos juga mendapat dukungan dari berbagai bantuan pembangunan dari instansi bilateral maupun multilateral dan terus mengalami peningkatan. Laos mulai memandang penting pengembangan hubungan kerjasama ekonomi dengan negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara. Laos telah menikmati manfaat dari penyerapan modal, pembangunan infrastruktur, perdagangan ekspor impor, serta sumber manusia dan program riset (World Bank 2016). Dengan adanya kemajuan ekonomi Laos, secara tidak langsung diikuti dengan peningkatan status Laos dari negara terbelakang menjadi negara berkembang.

Pemerintah Laos berupaya mengembangkan dan mempromosikan sektor swasta, termasuk investasi asing langsung (FDI) perlu dilakukan dalam rangka memperluas peluang bisnis dan peningkatan sektor-sektor ekspor yang memiliki keunggulan

komparatif. Peningkatan investasi di Laos akan memberikan kontribusi untuk transfer teknologi dan keahlian manajemen, serta pertumbuhan ekspor yang meningkat.. Selain itu di pembentukkan sektor perbankan yang sehat dan kompetitif juga dapat mendorong peningkatan tabungan dan sumber daya keuangan negara untuk penggunaan yang produktif.

Dalam estimasi *World Bank* pada Oktober 2010 tercatat pendapatan perkapita Laos adalah sekitar US\$ 2.435, sehingga Laos termasuk dalam negara dengan pendapatan menengah yang memiliki PNB perkapita antara US\$ 1.741-US\$ 2.990 (UNDP 2014). Peningkatan status tersebut juga disebabkan oleh peningkatan di sektor perdagangan bekerjasama dengan negara lain. Salah satunya adalah kerjasama perdagangan Laos-Indonesia yang terus meningkat hingga tahun 2013. Dalam pertemuan ke Empat Komisi Bersama Tingkat Menteri Luar Negeri Indonesia-Laos, Marty Natalegawa menyampaikan bahwa perdagangan Laos-Indonesia telah mencapai US\$ 27 juta, meningkat 300% dari tahun 2011 yaitu sebesar US\$ 9,9 juta (News 2003).

Target dalam rencana pembangunan lima tahun ke-7 Laos (2011-2015) adalah: pertumbuhan ekonomi nasional yang pesat, stabil, dan kontinyu untuk mencapai Sasaran Pembangunan Milenium PBB. Untuk itu Laos berinisiatif berpartisipasi dalam sistem ekonomi regional dan internasional (CRI 2012). Laos juga giat mengembangkan industri baru

Pemerintah Laos berstrategi untuk melepaskan diri dari keteringgalan pada tahun 2020 serta untuk memperkuat pondasi ekonomi. Hal tersebut telah tercantum dan diatur dalam *National Growth and Poverty Eradication Strategy (NGPES)* (GOL PDR 2003) yang sebelumnya bernama *The National Poverty Eradication Programme (NPEP)*. NGPES adalah kerangka strategis pemerintah yang komprehensif dalam upaya secara bertahap mengurangi jumlah bantuan pembangunan resmi (ODA), sehingga dapat mengubah status negara Laos menjadi negara maju pada tahun 2020 yaitu dengan cara meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan serta mengurangi kemiskinan (ResearchGate 2005). Menurut UNDP, Pemerintah juga berupaya melanjutkan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat ekuitas pada sekitar 7 persen, untuk mencapai peningkatan pendapatan perkapita penduduk multi etnis Laos sebesar tiga kali lipat pada tahun 2020 (UNDP 2014).

Salah satu proyek untuk memperbaharui database jumlah kemiskinan yang disebut oleh UNDP untuk dapat mendistribusikan ekonomi dan mengatasi kemiskinan tersebut didanai oleh *Swedish International Development*, Bank Dunia dan ADB (UNDP 2014).

Sejak awal, UNDP telah mendukung proses desentralisasi Laos melalui proyek Reformasi Administrasi Publik (GPAR) yaitu meliputi reformasi majelis nasional, sektor hukum, reformasi prosedur dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah (ResearchGate 2005).

Dalam strategi NGPES terdapat upaya reformasi administrasi untuk memperkuat pelayanan masyarakat di tingkat daerah hingga pusat berbasis masyarakat, sehingga diharapkan pelayanan publik akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui peningkatan dialog antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan organisasi sosial (ResearchGate 2005). Dengan demikian fungsi pemerintah dan pegawai negeri akan berlaku akuntabel, transparan dan berperilaku tidak diskriminatif.

Kesadaran terhadap dampak ketergantungan yang disebutkan oleh Ferraro terhadap negara lain melalui GPAR tersebut sejalan dengan kritik terhadap konsep strategi ketergantungan. Konsep tersebut akan terbantahkan oleh adanya kenyataan dari kurangnya peran negara dalam usaha untuk membangun masyarakat sendiri (*self-development* (Ferraro 2008)). Seperti dalam kerangka strategis NGPES (ResearchGate 2005), pemerintah Laos kemudian berupaya melakukan penguatan kerangka hukum dan peraturan, menciptakan kondisi yang menguntungkan dan mekanisme untuk meningkatkan kinerja lembaga keuangan dan pengembangan pasar modal. Selain itu juga berkomitmen untuk memperkuat insentif untuk kinerja yang kuat di semua bidang. Seperti dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta menjamin stabilitas persatuan dan penghormatan terhadap kepentingan sosial, budaya dan lingkungan masyarakat multi-etnis Laos.

Hal tersebut mengindikasikan perubahan konsep strategi pembangunan ekonomi ketergantungan Laos mengarah pada konsep strategi yang berwawasan ruang. Konsep tersebut menjadi usulan bagi negara berkembang untuk memperbaiki tata hubungan sosial, politik dan ekonomi kearah prinsip swadaya, partisipasi rakyat dan keadilan sosial dan lebih memperhatikan lapisan masyarakat paling bawah yang pada kenyataannya merupakan bagian terbesar dari masyarakat (Ferraro 2008). Secara garis besar, strategi NGPES pemerintah Laos meliputi empat sektor utama yaitu sektor agrikultur dan hutan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan jalan desa (ResearchGate 2005) :

A. Sektor Agrikultur/ Pengembangan Hutan

Pemerintah berupaya meningkatkan perdagangan hasil pertanian dan pengembangan hutan. Sebelumnya Pemerintah Laos telah berupaya dalam menghadapi

MEA 2015 melalui program yang disebut *Agricultural master Plan (AMP)* yaitu : produksi pangan dan komoditi; pembentukan organisasi petani, penerapan pola produksi berkelanjutan, relokasi lahan dan pembangunan desa; pelestarian hutan, pengirigasian lahan pertanian; pembangunan infrastruktur lahan pertanian dan hutan; penelitian dalam bidang pertanian dan kehutanan, serta peningkatan Sumber Daya Manusia (Ministry of Agriculture 2010).

Oleh sebab itu, pemerintah mencangkan strategi pembangunan ekonomi nasional melalui visi hingga tahun 2020 dalam bidang pertanian, Pemerintah Laos memiliki visi akan terus membangun sektor agrikultur, hutan dan sumber daya alam untuk jangka panjang. Yaitu melalui pembangunan yang berkelanjutan termasuk dalam bidang ekonomi sosial dan ekologi. Beberapa strategi Pemerintah Laos pada sektor agrikultur diantaranya (Ministry of Agriculture 2010):

1. Memperkenalkan secara bertahap dan meningkatkan aplikasi produksi modern pertanian pada UKM, terutama dalam menghadapi perubahan iklim kepada petani kecil,
2. Menjaga ketahanan pangan untuk menjaga keberlanjutan hidup masyarakat desa. Pada jangkauan yang lebih luas, Pemerintah Laos juga berupaya meningkatkan dan menerapkan inovasi teknologi produksi pertanian untuk meningkatkan nilai produksi bahan pangan untuk kebutuhan pasar baik domestik, regional dan global. Pada akhirnya visi tersebut ingin erat kaitanya dengan perwujudan UN MDG's terutama dalam skop regional ASEAN dan *The Greater Mekong Subregion*.

B. Sektor pendidikan

Prioritas pemerintah Laos berupaya meningkatkan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan yaitu dengan menyediakan akses pendidikan secara merata, baik pendidikan formal maupun informal, pelatihan kejuruan, peningkatan kualifikasi guru dan kurikulum sekolah serta peningkatan seluruh sektor pendidikan. Reformasi pendidikan di Laos dilakukan untuk menyiapkan generasi dengan pandangan ilmu yang luas, memiliki semangat patriotisme dan solidaritas dalam multi-etnis di Laos dan di lingkungan internasional. Pemuda Laos diharapkan mampu mempromosikan tradisi dan budaya, memiliki pengetahuan teknologi, skill, disiplin dan tanggungjawab. Selain itu harus memiliki kesehatan yang baik, kemampuan berpikir yang kreatif, gaya hidup yang sehat sehingga siap menjadi bagian pembangunan nasional (UNESCO 2011).

Dalam perkembangannya, terkait dengan Pembangunan Sosial dan Ekonomi Laos, pemerintah berhadapan peningkatan pendidikan untuk mendukung strategi melalui pengembangan pendidikan science, social (policy) dan teknologi untuk meningkatkan kualitas SDM (United Nations on Education and Cultural Organization 2010). Hal tersebut menjadi otoritas Menteri Pendidikan Laos (*Ministry of Education (MOE)*), yang melakukan strategi *Provincial Education Services (PES)* untuk mencari bibit unggul di wilayah terpencil. Seiring dengan diberlakukannya sistem desentralisasi, Pemerintah Pusat mendukung masing-masing wilayah distrik tersebut. Menteri Pendidikan juga bersinergi dengan Menteri Pertanian tentang pelatihan pemuda dalam sektor pertanian, aturan dan kerjasama yang diupayakan keduanya.

Sistem pendidikan di Laos terbagi menjadi 4 tahapan :*Pre-School Education, Primary Education, Secondary Education, dan Higher Education*. Dalam perkembangannya, pendidikan dimulai dari balita (*early childhood education (ECE)*) dengan menggunakan kurikulum non-formal, lokal kurikulum dan pelajaran kemampuan dan skill). ECE dimulai sejak umur 3 hingga 5 tahun untuk melatih pertumbuhan fisik dan emosional anak, kemampuan berbicara, menulis, membaca dan mendengarkan, serta kemampuan observasi dan menggambar yang merupakan kebiasaan dan skill dasar. Hingga pada tingkat *Primary Education*, anak dilatih untuk memiliki sikap demokratis, patriotis dalam situasi multikultural sehinggadapat mencintai negara dan lingkungan sekitar.

C. Sektor Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan yang terjangkau, perbaikan distribusi air minum yang aman, sistem sanitasi dan perbaikan standar gizi menjadi prioritas pemerintah Laos dalam sektor kesehatan. Pemerintah meningkatkan alokasi dana pelayanan kesehatan dan tenaga kerja dokter dengan bekerjasama dengan negara donor internasional. Dengan peningkatan kualitas kesehatan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Sehingga dapat bersaing dalam perkembangan ekonomi pasar liberal yang semakin ketat.

Pengeluaran kesehatan katastrofik telah memburuk dari 3,8% pada 2007-2008 menjadi 5% pada 2012-2013. Laos memiliki tingkat pengeluaran pemerintah yang rendah tetapi meningkat dan berkomitmen untuk meningkatkan pengeluaran kesehatan pemerintah hingga 9% dari total pengeluaran pemerintah pada tahun 2015. Dalam bergerak menuju cakupan kesehatan universal (UHC), Lao PDR akan perlu mengurangi ketergantungan

pada pendapatan yang dibiayai oleh kredit dari dana narkoba bergulir, meningkatkan pembiayaan kesehatan pemerintah domestik (disertai dengan perubahan dalam komposisi dan distribusinya), dan memperkuat mekanisme pembayaran.

Pengembangan sektor kesehatan dilaksanakan menurut dua jenis rencana kesehatan nasional: sektor kesehatan jangka lima tahun terkait pengembangan dan rencana operasional tahunan. Menteri Kesehatan bertanggung jawab untuk merumuskan rencana kesehatan nasional. Sejalan dengan Deklarasi Vientiane 2006 tentang Efektivitas Bantuan, Sektor-Luas Koordinasi (SWC) mekanisme untuk kesehatan melengkapi platform untuk Depkes, dalam kemitraan dengan semua pemangku kepentingan untuk peningkatan status kesehatan masyarakat.

Selain itu, kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan swasta melalui akreditasi dan perizinan. Upaya peningkatan sistem informasi kesehatan (HIS), serta peningkatan kuota tenaga kesehatan dan meningkatkan retensi pekerja kesehatan yang melayani di daerah pedesaan terus dilakukan Pemerintah Laos. Secara administratif, sistem kesehatan dibagi menjadi tiga tingkatan: pusat (Departemen Kesehatan, atau Depkes), provinsi (dinas kesehatan provinsi, atau PHO) dan tingkat kabupaten (dinas kesehatan kabupaten, atau Dinkes).

D. Pembangunan Infrastruktur dan Jalan Desa

Peningkatan infrastruktur merupakan bagian dari strategi untuk keluar dari status *Least Developed Country* pada tahun 2020 yang pertama kali dikonseptualisasikan pada Kongres Partai ke-6 pada tahun 1996. (S Acharya 2017). Pemerintah Laos berupaya untuk menjadi titik hubungan di antara negara-negara tetangga, menjembatani ekonomi yang lebih maju dari Cina, Thailand, dan Vietnam. Oleh sebab itu, Pemerintah Laos membuka kerjasama asing terkait pemenuhan dan pembangunan infrastruktur dan jalan desa, diantaranya (Open Development 2018) :

1. Transportasi

a. Pembangunan Jalan

Konektivitas jalan adalah elemen kunci dari rencana pemerintah Laos melalui bantuan dari Bank Pembangunan Asia dari Sub-Distrik Mekong Raya yang terkait dengan jalan raya. Pendanaan merupakan tantangan utama untuk pembangunan jalan. Pemerintahnya juga telah mengembangkan model pembiayaan berbasis lahan alternatif, yang pertama kali digunakan melalui

pengembangan proyek Jalan 450 Tahun, yang menghubungkan Jembatan Persahabatan Laos-Thailand dengan rute yang membentang ke utara dan selatan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Transportasi sedang mempertimbangkan kemitraan publik-swasta, dengan dukungan kebijakan dari Bank Dunia. Untuk menarik investasi sektor swasta di jalan tol untuk membantu mencapai tujuan infrastruktur jalan jangka panjang, meskipun banyak keuntungan sosio-ekonomi dari perluasan jalan di Laos, kritik juga ditujukan pada beberapa dampak negatif lingkungan dari proyek-proyek ini. Konsesi lahan ekonomi berskala besar yang terkait dengan jalan telah digunakan sebagai celah hukum untuk membenarkan penebangan di luar kuota nasional dan zona hutan produksi (Trends 2010). Proyek jalan telah mensyaratkan pengambilalihan lahan dari masyarakat tanpa kompensasi yang memadai, seperti dalam proyek Jalan 450 Tahun.

b. Pembangunan Rel

Terdapat satu-satunya infrastruktur kereta api yang digunakan di Laos adalah perpanjangan 3,5 km dari Thailand, berjalan dari Nongkhai melintasi Jembatan Persahabatan ke Stasiun Kereta Thanaleng, sejauh 20 km sebelah timur Vientiane. Pemerintah berencana untuk memperpanjang rel kereta api sejauh 9 km untuk mencapai pinggiran Vientiane (Oraboune 2008). Namun, ada rencana untuk mengembangkan dua jalur rel yang luas, menghubungkan Vientiane dengan Cina melalui perbatasan Boten di provinsi Luang Namtha; dan Thailand dan Vietnam di provinsi Savannakhet di Laos selatan. Jalur kedua dikenal sebagai proyek kereta api Savan-Lao Bao.

Jaringan kereta api yang direncanakan ini akan menghubungkan Kunming dan Singapura melalui berbagai rute, melewati Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Proyek Laos-Cina adalah investasi bersama pemerintah Laos dan Cina. Pemerintah Cina akan menginvestasikan 70% dari \$ 6 milyar yang dibutuhkan, sedangkan pemerintah Laos menyumbang 30% sisanya (Open Development 2018). Kereta api Savan-Lao Bao adalah proyek yang didanai swasta oleh perusahaan Malaysia (Giant Rail Company Limited), dengan pemerintah Laos mempertahankan 10% saham. Meskipun proyek ini disetujui pada tahun 2012, pada Oktober 2016, proyek tersebut baru mencapai tahap awal pemasangan pos koridor di sepanjang rute.

c. Pembangunan Jaringan Listrik

Jaringan listrik Laos telah berkembang pesat, melalui pengembangan sejumlah bendungan pembangkit listrik tenaga air yang signifikan. Pada tahun 2015, pemerintah Laos menyatakan bahwa setidaknya 70 proyek telah direncanakan atau sedang berjalan, dengan total potensi pembangkit sebesar 26.000 MW. Sebagian besar energi yang diproduksi direncanakan untuk diekspor secara internasional, dengan fokus pada pasar Thailand.²¹ Misalnya, Laos menghasilkan 3.200 MW tenaga air pada tahun 2014, dua pertiganya diekspor ke Thailand. Permintaan listrik telah tumbuh rata-rata 13% per tahun (UNDP 2014).

2. Komunikasi

i. Internet

Pembangunan infrastruktur tidak sempurna tanpa kelengkapan alat komunikasi dan informasi. Seiring dengan perkembangan jaman saat ini, internet menjadi salah satu media untuk dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Dalam perkembangannya, penggunaan internet meningkat secara dramatis dari 0,3% populasi di tahun 2004 menjadi 18,2% pada tahun 2015. Namun demikian, ini masih jauh di bawah tingkat penetrasi internet global sebesar 44% .²⁴ Langganan broadband tetap rendah pada kurang dari 0,5% populasi, namun demikian, ada peningkatan jumlah koneksi dari 11.287 pada tahun 2013 dan menjadi 36.408 pada tahun 2015, dan terus meningkat hingga akhir 2017.

ii. Perangkat Telepon

Seiring kemajuan teknologi informasi saat ini, penggunaan telepon seluler terus meningkat dari 3,6% pada tahun 2004 menjadi 84% pada tahun 2011, namun pada tahun 2015, angka resmi adalah 53,1%²⁶. Hal ini disebabkan keakuratan angka ini meningkat sebagai akibat dari penegakan pemerintah atas pendaftaran kartu SIM. Persentase saluran telepon tetap di Laos telah rendah secara historis, namun, peningkatan yang signifikan diamati antara 2011 (1,6%) dan 2015 (13,7%). Dalam perkembangannya seiring dengan berkembangnya teknologi telepon seluler pintar, tentunya dapat menjadi media membantu peningkatan SDM dan perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Laos dalam era globalisasi modern.

d. Pemenuhan Kebutuhan Air dan Sanitasi

Negara Laos memiliki lebih banyak sumber daya air per kapita daripada negara Asia lainnya, akan tetapi mengalami kemungkinan untuk terkontaminasi oleh bahan

kimia berbahaya dan limbah manusia. Sehingga menjadi perhatian Pemerintah Laos untuk mengimplementasikan rencana perluasan pembangkit listrik tenaga air. Untuk menghasilkan kualitas air. Hal tersebut karena sangat erat dengan sektor pertanian, industri, dan pertambangan, serta masalah kebersihan dan sanitasi yang buruk,

Karena kurangnya fasilitas dan pengetahuan yang memadai tentang sanitasi dan praktik-praktik kebersihan, lebih dari sepertiga penduduk Laos mempraktikkan buang air besar sembarangan dan hanya 19% tinja anak-anak dibuang dengan aman. Namun, praktik buang air besar sembarangan mengalami penurunan sebesar 37% sejak 1995. Selain itu, ada kesenjangan perkotaan-pedesaan yang kuat untuk akses sanitasi di Laos, di mana 87% rumah tangga di daerah perkotaan memiliki akses ke sanitasi yang lebih baik, dibandingkan dengan hanya 48% di daerah pedesaan.

Berbagai kebijakan dan upaya pembangunan yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintahan Laos memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan kerjasama dari negara lain. Strategi tersebut juga memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak domestik seperti Serikat Buruh, Serikat Perempuan dan Pemuda serta bantuan dari donor Internasional.

2. Tantangan Strategi Pembangunan Ekonomi di Laos (NGPES) 2020

Strategi pembangunan Ekonomi Laos hingga tahun 2020 terus berkembang, dan dalam penerapannya akan menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang dapat mempengaruhi efektifitas kebijakan ekonomi pemerintah Laos. Berikut beberapa tantangan yang menjadi hambatan pembangunan Ekonomi di Laos, yaitu letak geografis, sistem desentralisasi, dan kualitas sumber daya manusia.

a) Letak Geografis

Secara geografis, letak Laos berbatasan dengan Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar dan China. Negara, dengan luas daratan sekitar 236.800 kilometer persegi dan 70 persen diantaranya berupa kawasan pegunungan. Letak geografis Laos tersebut memunculkan pengaruh positif, namun juga memberikan dampak negatif yang menjadi tantangan untuk segera dicari jalan keluarnya. Peneliti mengamati beberapa tantangan yang mungkin muncul dari letak geografis Laos:

a. Keterbatasan Wilayah

Laos merupakan negara *landlocked* yang terletak di Asia Tenggara, dan berbagi perbatasan dengan China, Kamboja, Myanmar, Thailand dan Vietnam, dengan total wilayah seluas 236.800 km² (WTO, 2009). Lokasi Laos yang

berada di antara negara-negara tetangga yang lebih kuat, sering menjadikannya sebagai penyangga, serta persimpangan jalan untuk perdagangan dan komunikasi. Migrasi dan konflik internasional telah memberi kontribusi pada keanekaragaman kelompok etnis negara. Sehingga dari segi keamanan maupun politik bahwa *landlocked country* memiliki potensi ketegangan yang lebih banyak dibandingkan dengan negara lain. Negara tetangga yang berfungsi sebagai negara transit, bisa saja memainkan posisi strategisnya dengan menekan *landlocked country* untuk berbagai kepentingan (Felden 2012).

Salah satunya adalah ketika pemerintah Laos berambisi untuk membangun bendungan di Sungai Mekong. Dua proyek bendungan yang kontroversial telah menimbulkan perselisihan dengan negara tetangga. Meskipun berhasil diselesaikan melalui kesepakatan *Mekong River Commission*, yang selain Laos juga terdiri dari Vietnam, Thailand dan Kamboja yang menyepakati untuk memanfaatkan potensi ekonomis Sungai Mekong secara bersama dan mengelola sumber daya sungai dengan musyawarah bersama.

Namun kesepakatan ini hanyalah sebuah perjanjian tidak mengikat dan tidak memiliki hukum tertulis. Dalam kasus bendungan Don Sahong tidak ada perjanjian seperti ini dengan negara-negara tetangga. Pemerintah Laos beralasan, proyek ini hanyalah proyek persiapan dan tidak memerlukan izin dari negara tetangga. Hal tersebut dapat menjadi pemicu konflik perebutan wilayah dengan negara tetangga (Felden 2012). Sehingga dapat menimbulkan instabilitas politik dalam negeri Laos yang multikultural.

b. Ancaman Konflik (Multi-etnis)

Secara historis tahun 2008 jumlah penduduk Laos mencapai 6.677.534 jiwa, dengan etnis yang kompleks. Etnis terbesar yaitu Lao sebanyak 80% meliputi: Lao di daratan Rendah, Lao Theung, dan Lao Soung yang tinggal di pedesaan. Sedangkan beberapa etnis lain ialah Meo (Hmong), Yao (Man), dan Thai (Felden 2012). Kondisi multietnis juga dapat menjadi hambatan sekaligus tantangan bagi pemerintah Laos karena latar belakang historis Laos yang pernah mengalami beberapa kali kependudukan negara asing yaitu Thailand, Perancis dan Jepang (UN 2004). Kondisi yang multikultural ini dapat menjadi ancaman ketika jumlah pendatang asing semakin meningkat dan memunculkan pergesekan karena terdapat persaingan dan kesenjangan sosial yang mengakibatkan konflik dan mengancam keberagaman di Laos. Secara tidak

langsung akan muncul perasaan kelompok mayoritas dan minoritas, sehingga memancing ketidakstabilan sosial dan keamanan dalam negeri Laos itu sendiri.

b) Sistem Desentralisasi

Pemerintah Laos telah melepas kontrol ekonomi dan mengizinkan berdirinya perusahaan swasta sejak tahun 1986. Laos secara ekonomi lebih bebas, tetapi secara politik masih otoriter. Terbukti dengan hanya adanya satu partai dan tidak ada kekuatan oposisi. Pembangunan daerah melalui pembangunan hotel, kantor pemerintah, hingga pusat perdagangan telah banyak dilakukan. Namun terjadi penumpukan penduduk di pusat kota. Berdasarkan data statistik tingkat urbanisasi di Laos dari 2007 hingga 2017 mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Urbanisasi berarti bagian dari populasi perkotaan dalam total populasi suatu negara. Pada 2017, 40,67 persen populasi Laos tinggal di daerah perkotaan dan kota (Portal 2017), sehingga banyak penduduk desa di Laos pindah ke kota besar seperti Vientiane. Mengingat selama ini, Laos seperti negara Asia Tenggara pada umumnya, hanya mengkonsentrasikan kegiatan ekonomi dan perdagangan terpusat di ibukota. Arus urbanisasi lebih menggejala, ketimbang otonomi daerah.

Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan ekonomi yang terus meningkat, hambatan sekaligus tantangan baru muncul, yaitu jumlah urbanisasi meningkat (*Urban Environmental Pollution*). UNDP melaporkan bahwa meskipun lebih dari satu dekade pertumbuhan ekonomi meningkat namun tidak sesuai dengan proporsi populasi. Pendapatan perkapita tahunan hanya US\$350,2 (UNDP 2014). Kondisi lemahnya manajemen pelayanan perkotaan dalam mengurus masalah kependudukan dan pelayanan publik dapat menjadi salah satu penyebab peningkatan urbanisasi (Mabbitt 2006).

Kondisi tersebut berbenturan dengan sistem desentralisasi yang diterapkan Pemerintah Laos. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam sistem desentralisasi memungkinkan ketidakmerataan pembangunan ekonomi di Laos dan hal tersebut semakin memicu peningkatan jumlah urban. Selain itu juga disebabkan oleh kurang jelasnya definisi dan katagori wilayah pedesaan dan perkotaan, sehingga menyamakan pengertian urbanisasi dan dapat menghalangi strategi pemerintah untuk membangun infrastruktur dan jalan desa serta sektor yang lain (Mabbitt 2006). Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah Laos untuk membentuk langkah strategis sesuai dengan alur diagram strategi pembangunan desa yang telah dibentuk pada tahun 2020.

c) Kualitas Sumber Daya Manusia

Potensi alam Laos mayoritas terletak pada sektor pertanian sebagai pendukung utama perekonomian negara. Namun demikian hal tersebut tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang masih tergolong rendah. Sehingga hal tersebut menjadi tantangan lain yang dihadapi oleh Laos adalah masih rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia yang dimiliki jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Banyak anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikan sekolah dasar lima tahun termasuk anak-anak perempuan, dan sedikit lulusan ke sekolah menengah. Jumlah keluarga petani menjadi mayoritas penduduk Laos, sehingga Pemerintah Laos berupaya meningkatkan kesetaraan gender dalam pendidikan yang di khususkan pada pendidikan formal bidang pertanian. Mengingat jumlah perempuan yang aktif sebagai aktor ekonomi keluarga. Pendidikan dibutuhkan terutama dalam training dan pelatihan teknis tentang produksi pertanian dan sistem pertanian yang baik (Ministry of Agriculture 2010).

Berdasarkan data dalam *Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2001: The Hidden Crisis, Armed Conflict and Education* yang dikeluarkan oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) yang di keluarkan pada tahun 2011, bahwa indeks pembangunan pendidikan (*Education Development Index (EDI)*) berdasarkan data tahun 2008 adalah 0,934 (UNESCO 2011).

Menurut Nilai tersebut menempatkan Laos pada posisi ke-109 dari 127 negara di dunia (UNESCO 2011). Dengan demikian, bagaimana dapat meningkatkan skill dan perekonomian, jika sumber daya manusia di Laos masih tergolong rendah. Namun demikian masalah ekonomi juga menjadi penyebab pendidikan yang rendah yang menjadi tugas bagi pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dengan bekerjasama dan mencontoh negara maju.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa tantangan paling besar yang harus menjadi perhatian Pemerintah Laos adalah rendahnya kualitas SDM masyarakat. Hal tersebut menjadi modal dasar bagi pembangunan Laos yang demokratis. Sehingga dengan terpenuhinya hak pendidikan maka akan mencapai kemajuan pertumbuhan ekonomi Laos. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan harus dilakukan

ketika teknologi menjadi lebih efisien dan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dalam menggunakan teknologi tersebut. Adanya peningkatan ekonomi maka akan mengarah pada peningkatan hasil produksi industri di berbagai sektor yang lebih besar. Oleh sebab itu pendidikan menjadi hal yang paling penting untuk meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknologi.

Selain itu, sektor yang menjadi penyumbang pendapatan Laos adalah sektor pariwisata karena keindahan alamnya yang melimpah. Hal tersebut dibuktikan pada saat Laos pernah menjadi negara tujuan turis terbaik di dunia oleh dewan pariwisata dan perdagangan Eropa dan New York Times (Potaka 2010). Namun demikian kurangnya promosi dari pemerintahan terhadap dunia luar mengenai potensi pariwisata tersebut menjadi tantangan yang harus menjadi perhatian pemerintah Laos. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk semakin memperluas kerjasama perdagangan di bidang agrikultur ke negara-negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Allo, Markus Duan, (2004), *Bentuknya Seperti Bunga Kamboja*, Kompas, 33
- Blaug, M. *The Methodology of Economics or How Economics Explain*. Cambridge University Press. Cambridge. 1985.
- Chong, Y. L., *The Evolution of The Urban Pattern of Shouth East Asia During the Nineteenth and Twentieth Centuries, Ph.D. Thesis, School of Oriental and African Studies*, University of London. 1976
- Ferraro, V. *Dependency Theory: An Introduction, in the Development Economics Reader*, ed: Giorgio Secodi, London. Routledge. 2008.
- Haris, Syamsuddin. *Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia*. Grafiti Press. Jakarta. 2007.
- Mabbitt, Richard, (2006), *Urbanization and Sustainability in Lao Peoples Democratic Republic, Urbanization and Sustainability in Asia*
- Potaka, Elis, *Asia Calling, Inside Laos the Battery of South Asia: Eco Tourism in Lao*, Asia Calling, 2010.
- Schultz, Theodore W, (1961), *Investment in Human Capital Investment in Human Capital, The American Economic Review*, 2
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. Bandung. 2009

UNESCO, (2011), *The hidden crisis: Armed conflict and education*, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1-17

Potaka, Elis, *Asia Calling, Inside Laos the Battery of South Asia: Eco Tourism in Lao*, Asia Calling, 2010.

Nations, United. *LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC*. Report, United Nations, 2004

Oraboune, S. "Infrastructure Development in Lao PDR." 2008.

S Acharya, Rasphone S. "Graduation from Least Developed Country Status. ." *The 5th National Human Development Report*", 2017: .

UNESCO. *The hidden crisis: Armed conflict and education*. Report, Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2011.

Sumber Online:

Amadeo, Kimberly. *The Balance*. diakses melalui <https://www.thebalance.com/trickle-down-economics-theory-effect-does-it-work-3305572>

ASEAN, Secretariat. 2014. diakses melalui <http://asean.org/news/asean-secretariat-news/item/a-review-of-the-work-plan-to-support-the-integration-of-cambodia-lao-pdr-myanmar-and-viet-nam-to-asean-is-undeway-2>

CRI. *Ekonomi Laos Berkembang*. 2012. diakses melalui <http://indonesian.cri.cn/201/2012/03/27/1s126398.htm>

Darmayadi, Andrias. "KESENJANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA CLMV1 DAN PENGARUHNTERHADAP ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2015." *Repostory UNICOM*. 2015. diakses melalui <https://repository.unikom.ac.id/30687/1/kesenjangan-pertumbuhan-ekonomi-di-negara-clmv-andrias-darmayadi.pdf>

Felden, Esther. *Ambisi Laos di Mekong*. 2012 diakses melalui <https://www.dw.com/id/ambisi-laos-di-mekong/a-16236305>

Hiebert, Murray, dan Gregory B. Poling. *Engaging Laos: Strategic Part of the ASEAN Puzzle*. 29 September 2011 diakses melalui <https://www.csis.org/analysis/engaging-laos-strategic-part-asean-puzzle>

Kemlu. *Embassy Of Republic Indonesia-Laos*. 2018. diakses melalui <https://www.kemlu.go.id/vientiane/id/Pages/Laos.aspx>

Kompas, Internasional. *Kompas Online*. 2011 diakses melalui <https://internasional.kompas.com/read/2011/03/28/05182886/laos.mengatasi.ketertinggalan.ekonomi>.

Lao's Woman Union. 2014. diakses melalui

http://laowomanunion.org.la/index.php?option=com_jdownloads&itemid=0&view=finish&cid=5&catid=7&m=0&lang=lo

Ministry of Agriculture. "Lao PDR Ministry of Agriculture and Pedistry: Strategy for Agricultural Development 2011-2020." *Theresdddesk.org*. 2010. diakses melalui https://theresdddesk.org/sites/default/files/strategy_for_agricultural_development_2011_to_2020_1.pdf

News, NRM. *perdagangan indonesia laos naik 300 persen*. 11 November 2003 diakses melalui <http://nrmnews.com/2003/07/11/perdagangan-indonesia-laos-naik-300-persen/> (diakses Juli 17, 2018).

Online, CRI. *Ekonomi Laos Berkembang*. 2012 diakses melalui <http://indonesian.cri.cn/201/2012/03/27/1s126398.htm>

Open Development. *Infrastructure*. 2018. diakses melalui <https://laos.opendevlopmentmekong.net/topics/infrastructure/>

PDR, Ministry of Foreign Affairs of LAO. *Statement By H.E. Mr. Phongsavath BOUPHA Former Minister and Head of President's Office At the Ninth Bali Democracy Forum: "Religion, Democracy and Pluralism"*. 2015. diakses melalui http://balidemocracyforum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=118:statement-by-he-mr-phongsavath-boupha-vice-minister-of-foreign-affairs-of-the-lao-peoples-democratic-republic&catid=40:article&Itemid=137.

Portal, The Statistic. *Laos: Urbanization from 2007 to 2017*. diakses melalui <https://www.statista.com/statistics/804988/urbanization-in-laos/>

Prihtiyani, Eny. *International Kompas : Laos Mengatasi Ketertinggalan Ekonomi*. 28 Maret 2011 diakses melalui

<https://internasional.kompas.com/read/2011/03/28/05182886/laos.mengatasi.ketertinggalan.ekonomi>

ResearchGate. *National Growth and Poverty Eradication Strategy (NGPES)*. Januari 2005. diakses melalui

[http://www.researchgate.net/publication/44834276_National_Growth_and_Proverty_Eradication_Strategy_\(NGPES\)](http://www.researchgate.net/publication/44834276_National_Growth_and_Proverty_Eradication_Strategy_(NGPES))

Rivers, International. *International Rivers (People. Water. Life)*. 18 Januari 2013 diakses melalui <http://www.internationalrivers.org/resources/cambodia-vietnam-and-donors-challenge-laos-on-mekong-dams-7802>

The Statistic Portal, Laos: Urbanization from 2007 to 2017 diakses melalui HYPERLINK "<https://www.statista.com/statistics/804988/urbanization-in-laos/>" <https://www.statista.com/statistics/804988/urbanization-in-laos/>

The World Bank, Lao PDR diakses melalui HYPERLINK "<https://data.worldbank.org/country/lao-pdr>" <https://data.worldbank.org/country/lao-pdr>

Trends, Forest. "Timber Markets and Trade Between Laos and Vietnam: A Commodity Chain Analysis of Vietnamese Driven Timber Flows". *Forest Trends 2010*, 2010.

UAJY. *e-journal UAJY*. 2014. diakses melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/8217/2/EP119047.pdf>

- UN. "Profile Laos." *United Nations Org.* Januari 2004. <http://www.un.org/depts/Cartographic/map/profile/Laos/pdf> (diakses Juli Senin, 2018).
- UNDP. *Proverty NGPES.* 2014 diakses melalui http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/home/library/proverty/NGPES/ (diakses Juli 17, 2018).
- United Nations . "Lao." *United Nations Org.* 2013 diakses melalui <http://www.un.org/en/conf/ldc/pdf/laos%20pdr.pdf>
- United Nations on Education and Cultural Organization. "World Data on Education." *IBE UNESCO.* 2010 diakses melalui http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Lao_PDR.pdf
- United Nation. Lao diakses melalui [HYPERLINK "http://www.un.org/en/conf/ldc/pdf/laos%20pdr.pdf"](http://www.un.org/en/conf/ldc/pdf/laos%20pdr.pdf)
<http://www.un.org/en/conf/ldc/pdf/laos%20pdr.pdf> .
- United Nations, Profile Laos diakses melalui [HYPERLINK "http://www.un.org/depts/Cartographic/map/profile/Laos/pdf"](http://www.un.org/depts/Cartographic/map/profile/Laos/pdf)
<http://www.un.org/depts/Cartographic/map/profile/Laos/pdf>
- United Nations Development Programme, Proverty NGPES* diakses melalui [HYPERLINK "http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/home/library/proverty/NGPES/"](http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/home/library/proverty/NGPES/)
http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/home/library/proverty/NGPES/
- WHO. "Lao People's Democratic Republic Health System Review." *WHO International.* 2014. diakses melalui http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/207762/9789290616481_eng.pdf;jsessionid=9B5F7930FA17FB1F5F1753621016D8E0?sequence=1
- World Bank. *A Policy Snapshot of Health and Nutrition in Lao PDR.* 2014. diakses melalui <http://www.worldbank.org/en/country/lao/publication/a-policy-snapshot-of-health-and-nutrition-in-lao-pdr>
- . *Lao PDR.* 2016. diakses melalui <https://data.worldbank.org/country/lao-pdr>